

Research Article



## Dinamika Perencanaan Pembangunan Inklusif: Tinjauan Sistematis Berbasis Pendekatan PRISMA

Ajie Hanif Muzaqi<sup>1</sup>, Muhammad Farid Ma'ruf<sup>2</sup>, Johan Wahyuningrat<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

<sup>3</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

### Abstrak

Perencanaan pembangunan inklusif telah muncul sebagai paradigma transformatif dalam kebijakan publik kontemporer, yang didorong oleh keharusan global dalam rangka operasionalisasi mandat "leaving no one behind". Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi fragmentasi dalam literatur akademis dengan menyintesis interaksi dinamis antara prasyarat tata kelola (governance) dan hasil kesejahteraan nyata bagi populasi yang termarginalkan. Dengan menerapkan Systematic Literature Review (SLR) yang didasarkan pada protokol PRISMA dan analisis Publish or Perish (PoP), penelitian ini pada awalnya mengidentifikasi 2.081 dokumen dalam basis data Scopus dan Google Scholar/Crossref. Setelah mengeliminasi 705 dokumen yang terduplikasi, sebanyak 1.376 dokumen disaring kembali sehingga menghasilkan 52 paper yang memenuhi syarat. Selanjutnya terdapat 31 Artikel/ Paper terpilih berdasarkan kriteria kekuatan informasi (information power). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembangunan inklusif secara intrinsik terikat pada konteks, yang berkembang melalui tiga trajektori utama yaitu transisi dari pendekatan berbasis pertumbuhan (growth-centricity) menuju kesejahteraan bio-psikososial, integrasi keadilan ekologis di era Anteseden, dan inklusi relasional untuk memitigasi asimetri kekuasaan yang telah mengakar. Lebih lanjut, analisis ini mengidentifikasi adanya kesenjangan implementasi (implementation gap) yang meluas, di mana asimetri birokrasi dan tokenisme prosedural berupa partisipasi simbolis menghambat keterlibatan masyarakat secara substantif. Kerangka kerja integratif yang dihasilkan menunjukkan bahwa agensi individu dan dukungan organisasi hanya dapat ditransformasikan menjadi konsekuensi kinerja apabila dimediasi oleh keterlekatan sosial (social embeddedness) dan dimoderasi oleh literasi digital. Secara teoretis, penelitian ini mengonseptualisasikan ekosistem perencanaan partisipatif yang holistik, sementara secara praktis merekomendasikan transisi radikal dari keterlibatan simbolis menuju pembagian kekuasaan yang substantif (substantive power-sharing) untuk memastikan pembangunan wilayah yang tangguh dan berkeadilan.

### Article History:

Received: 22 Juni 2026

Accepted: 25 Juni 2026

Published: 30 Juni 2026

**Keywords:** *Anteseden; Konsekuensi; Pembangunan Inklusif; Pembagian Kekuasaan; PRISMA*

### Correspondence Email:

[ajiemuzaqi@unesa.ac.id](mailto:ajiemuzaqi@unesa.ac.id)

### 1. Pendahuluan

Paradigma pembangunan berkelanjutan kini bertransformasi menjadi pembangunan inklusif, sebuah pendekatan yang mengutamakan hak-hak kelompok termarginalkan dengan mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan ekologis (Popova, 2020). Komitmen global tersebut dipertegas oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui prinsip "leaving no one behind" yang menuntut perluasan ruang partisipasi bagi populasi rentan dalam seluruh siklus Pembangunan (Gupta & Vegelin, 2016). Kontestasi empiris di berbagai negara berkembang pun menunjukkan tren serupa, seperti upaya mengonsolidasikan aksi kolektif di India (Katyaini et al., 2021) maupun penyusunan kebijakan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) (CC BY-SA 4.0) license.



perlindungan sosial yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat di Afrika Sub-Sahara (Reinders et al., 2019) (N. R. M. Pouw & De Bruijne, 2015).

Di Indonesia, implementasi konsep ini masih menghadapi tantangan struktural karena aspirasi kelompok marginal sering kali belum terakomodasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (Widianingsih & Paskarina, 2019). Situasi ini memicu paradoks; di satu sisi, desentralisasi fiskal melalui Dana Desa terbukti mampu mendorong pertumbuhan inklusif (Ernawati et al., 2021) (Murthi et al., 2022), namun di sisi lain, realitas di lapangan masih membentur hambatan birokrasi yang serupa dengan masalah distribusi proyek di Amazon Brasil (Abers et al., 2017) serta praktik partisipasi yang sekadar formalitas seperti di Nepal (Acharya & Zafarullah, 2024). Kesenjangan ini diperparah oleh tren literatur terdahulu yang cenderung memisahkan analisis tata kelola institusional dari hasil akhir perencanaan (Widianingsih & Paskarina, 2019). Akibatnya, fokus penelitian menjadi parsial dan jarang menghasilkan sintesis utuh yang mampu menjembatani anteseden serta konsekuensi kebijakan (Dywili & Draai, 2019).

Ketika penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada pembahasan normatif berskala luas (Gupta & Vegelin, 2016) atau terbatas pada satu wilayah geografis saja (Abers et al., 2017; Acharya & Zafarullah, 2024), studi ini menawarkan kebaruan melalui penyusunan kerangka kerja integratif yang menghubungkan sebab-akibat (anteseden-konsekuensi) secara utuh. Melalui sintesis PRISMA terhadap 31 artikel global pilihan, kontribusi utama penelitian ini adalah mengurai sistem perencanaan partisipatif dengan menjembatani prasyarat tata kelola institusional dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat di akar rumput. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi panduan strategis untuk mengubah keterlibatan masyarakat yang selama ini sekadar formalitas menjadi pembagian kewenangan yang nyata dan substantif.

Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini menerapkan metode *Systematic Literature Review* (SLR) berstandar PRISMA guna menyintesis publikasi global selama satu dekade terakhir. Studi ini dirancang untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) bagaimana perkembangan konsep perencanaan pembangunan inklusif dalam studi akademik dan praktik tata kelola lokal; serta (2) bagaimana struktur tematik yang dapat menjembatani faktor pendorong (anteseden) inklusi dengan dampak nyata (konsekuensi) dari perencanaan partisipatif tersebut. Melalui kerangka kerja integratif yang menekankan peran keterlibatan sosial dan literasi digital, artikel ini tidak hanya memperkaya teori administrasi publik, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan untuk menggeser partisipasi formalitas menjadi pembagian kewenangan yang nyata demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Konsep dan Karakteristik Partisipasi dalam Pembangunan Inklusif

Partisipasi warga dalam pembangunan inklusif dikonseptualisasikan bukan sekadar sebagai kehadiran fisik masyarakat, melainkan sebagai keterlibatan strategis dalam proses pengambilan keputusan dan tata kelola. Secara luas, konsep ini menandai transisi kritis dari retorika prosedural menuju aktualisasi kewargan kota yang substantif (*substantive urban citizenship*). Esensi strategis dari konsep ini terletak pada optimalisasi modal sosial dan tata kelola interaktif, yang secara efektif memanfaatkan sumber daya lokal serta pengetahuan asli masyarakat setempat (*indigenous knowledge*) (Triyanti et al., 2017). Praktik-praktik partisipatif ini beririsan di berbagai sektor, mulai dari adaptasi lingkungan pesisir dan perencanaan tata ruang lingkungan perumahan, hingga strategi ketangguhan iklim. Pada dasarnya, partisipasi warga di tingkat akar rumput berfungsi sebagai mekanisme pembagian kekuasaan (*power-sharing*), yang memastikan bahwa agenda pembangunan diselaraskan secara ketat dengan kebutuhan lokal, hak asasi manusia, dan realitas empiris masyarakat.

Berbeda dengan pendekatan pembangunan dari atas ke bawah (*top-down*) atau tersentralisasi yang sering kali menyeragamkan kebijakan tanpa mempertimbangkan konteks lokal, pembangunan inklusif yang digerakkan oleh partisipasi warga memiliki karakteristik yang sangat spesifik. Berdasarkan literatur yang ada, tiga fitur utama membedakan paradigma ini:

1. **Berakar pada Tata Kelola Interaktif dan Ekosistem:** Partisipasi bukan sekadar keterlibatan dalam Pembangunan infrastruktur fisik, melainkan sangat bergantung pada integrasi modal sosial dan pendekatan berbasis ekosistem, khususnya dalam konteks kerentanan lingkungan (Triyanti et al., 2017).
2. **Berorientasi pada Perencanaan Skala Mikro (Lingkungan Permukiman):** Terdapat fokus yang kuat pada perencanaan tingkat lingkungan permukiman (*neighborhood planning*) sebagai elemen esensial untuk memitigasi dampak urbanisasi yang cepat, terutama di kota-kota sekunder (Asibey et al., 2026).
3. **Menghubungkan Isu Tata Kelola dengan Pemenuhan Hak:** Partisipasi warga menjalankan fungsi ganda; instrumen ini digunakan tidak hanya untuk mencapai ketangguhan kota (*urban resilience*) (Jones & Comfort, 2020) tetapi juga sebagai instrumen untuk tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan perlindungan hak asasi manusia (Fon et al., 2024).

## 2.2 Dinamika Kontekstual Pembangunan Partisipatif Lintas Wilayah

Untuk memahami variasi dalam praktik dan tantangan terkait partisipasi warga dalam pembangunan, pemetaan literatur di berbagai konteks geografis dan fokus tematik menjadi hal yang sangat penting. Pada Tabel 1 ini memaparkan bagaimana diskursus ini dikontekstualisasikan dan dikaji di berbagai wilayah regional yang berbeda.

*Tabel 1 Perbedaan Temuan Kunci Pembangunan Inklusif antar Wilayah*

<b>Region</b>	<b>Penulis</b>	<b>Temuan Kunci</b>	<b>Fokus penelitian</b>
<b>Harare, Zimbabwe</b>	(Matamanda & Chinozvina, 2020)	Partisipasi warga dalam meningkatkan pembangunan perkotaan pada pencapaian kota yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh, meskipun partisipasi semacam itu tidak selalu terjamin.	Faktor-Faktor Penggerak Partisipasi Warga dalam Praktik Pembangunan Perkotaan
<b>Demak, Indonesia</b>	(Triyanti et al., 2017)	Mendorong pembangunan pesisir yang inklusif memerlukan kombinasi modal sosial, tata kelola interaktif, dan pendekatan berbasis ekosistem.	Efektivitas Strategi Berbasis Ekosistem Mangrove dalam Tata Kelola Interaktif dan Perlindungan Pesisir
<b>Ghana</b>	(Asibey et al., 2026)	Perencanaan tingkat lingkungan permukiman ( <i>neighborhood planning</i> ) merupakan elemen esensial dalam upaya mewujudkan pembangunan perkotaan yang inklusif, khususnya di kota-kota sekunder yang mengalami urbanisasi secara cepat.	Batasan Perencanaan Lingkungan Permukiman Partisipatif dan Transisi dari Retorika Prosedural menuju Kewargaan Kota yang Substantif
<b>Cape Town, South Africa</b>	(Sibanda & Lues, 2021)	Inklusi partisipasi publik dalam rencana Pembangunan dengan menyoroti perhatian masyarakat dan menegaskan pentingnya pembangunan inklusif.	Perencanaan Pembangunan berbasis ketahanan Iklim dan Progresnya di Perkotaan
<b>Cameroon</b>	(Fon et al., 2024)	Perencanaan pembangunan komunitas yang melibatkan partisipasi publik secara nyata memfasilitasi praktik tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ), penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pembangunan inklusif.	Dilema Partisipasi Warga dan Pembangunan Komunitas di Tingkat Pemerintah Daerah

Tabel sebelumnya menggambarkan bahwa implementasi pembangunan inklusif menghadapi tantangan yang heterogen dan fokus tematik yang bervariasi, bergantung pada lanskap geografis dan isu-isu lokal setempat. Di Afrika Bagian Selatan, khususnya Harare, Zimbabwe (Matamanda & Chinozvina, 2020), fokus partisipatif didorong oleh urgensi untuk menumbuhkan kota-kota yang tangguh; namun, literatur mencatat adanya kesenjangan yang mencolok



antara kerangka kerja teoretis dan jaminan pelaksanaan partisipasi tersebut di lapangan. Sebaliknya, di kota-kota sekunder Ghana, Asibey et al. (2026) mengamati bahwa tekanan urbanisasi yang masif menuntut adanya perencanaan tata ruang skala lingkungan permukiman sebagai mekanisme fundamental bagi komunitas yang memperjuangkan hak-hak kewargaan kota yang substantif (*substantive urban citizenship rights*).

Lebih lanjut, dalam konteks geografis kepulauan di Demak, Indonesia, Triyanti et al. (2017) menunjukkan bahwa partisipasi warga memperlihatkan karakter bio-sosial yang sangat kuat. Di wilayah ini, efektivitas pembangunan inklusif tidak dapat dicapai hanya melalui dialog kewargaan semata; melainkan menuntut adanya penggabungan antara modal sosial lokal dengan strategi konservasi ekosistem pesisir (*mangrove*). Paradigma ini mengindikasikan adanya pergeseran kritis pada fokus perhatian, dari yang awalnya berupa tata kelola administratif murni menuju ketahanan hidup ekologis (*ecological survivability*).

Berdasarkan sintesis literatur tersebut, terlihat jelas bahwa partisipasi warga dalam pembangunan inklusif pada hakikatnya terikat pada konteks lokal (*context-bound*) dan tidak dapat distandardisasi melalui pendekatan tunggal yang monolitik. Perbedaan dalam temuan-temuan di atas sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis (misalnya, ancaman wilayah pesisir di Indonesia versus ketangguhan iklim perkotaan di Cape Town), laju demografi (urbanisasi yang cepat di Ghana), serta kematangan institusional dan politik lokal (seperti dilema tata kelola di Kamerun dan Zimbabwe). Oleh karena itu, guna menjamin efektivitas partisipasi warga, rencana pembangunan dituntut untuk mengadopsi pendekatan yang sensitif terhadap konteks (*context-sensitive approach*) untuk mengintegrasikan berbagai determinan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling berpotongan di masing-masing wilayah.

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan desain Tinjauan Literatur Sistematis (*Systematic Literature Review/SLR*). Pada hakikatnya, penelitian kualitatif berfungsi sebagai kerangka kerja investigasi mandiri yang bergantung sepenuhnya pada analisis data kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena spesifik (Tenny et al., 2020). Adopsi desain ini didasarkan pada premis bahwa metodologi kualitatif menyediakan landasan epistemologis (*epistemological scaffolding*) esensial yang diperlukan untuk mendekonstruksi interaksi sosial yang rumit serta untuk merasionalisasikan investigasi studi kasus murni (Feagin et al., 2016), (Priya, 2021).

Pendekatan SLR kualitatif ini dipilih untuk membangun kerangka kerja yang ketat (*rigorous*) dan transparan, guna memastikan replikabilitas pengodean (*coding replicability*) dalam penelitian tematik (Roberts et al., 2019). Secara praktis, desain penelitian ini dibangun untuk memenuhi kriteria kredibilitas sejak tahap perencanaan awal (Bengtsson, 2016). Oleh karena itu, pemilihan literatur tidak mengambil sampel secara acak (*random sampling*), melainkan memanfaatkan panduan terstruktur seperti PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) untuk menjustifikasi inklusi dari setiap artikel (Gammelgaard, 2017). Melalui protokol ini, seluruh proses penelitian kualitatif dilakukan dengan kepatuhan ketat terhadap standar etika akademik (Arifin, 2018).

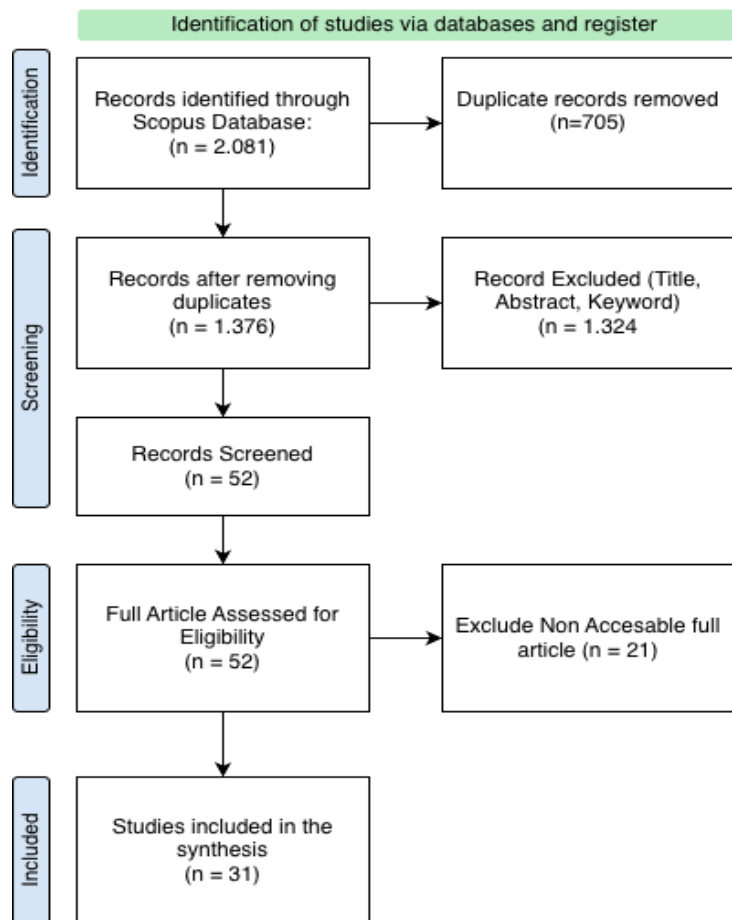
#### 3.2 Sumber Data

Penelitian ini menetapkan Scopus dan *Google Scholar/Crossref* sebagai basis data tunggal karena reputasinya dalam menyediakan literatur hasil tinjauan global (*peer-reviewed*) yang memiliki kualitas tinggi serta memenuhi standar *methodological rigor*. Untuk mengoptimalkan proses pencarian, digunakan perangkat lunak *Publish or Perish* (PoP) yang difungsikan secara spesifik sebagai instrumen ekstraksi utama. PoP digunakan untuk melakukan *query* dan penarikan metadata secara efisien dari repositori terindeks Scopus dan *Google Scholar/Crossref* guna menjamin cakupan multidisiplin yang relevan dengan titik temu antara perencanaan tata ruang, tata kelola, dan kebijakan publik (Malterud et al., 2016).

Penyaringan awal menghasilkan data sebanyak 2.081 artikel dijalankan dengan menggunakan kombinasi spesifik dari rangkaian kata kunci utama (*search strings*): "*inclusive development planning*," "*spatial/urban planning*," "*public policy*," dan "*citizen engagement/musrenbang*." Protokol penyaringan berbasis kata kunci ini bertujuan untuk

menyaring hasil pencarian agar berfokus secara eksklusif pada dinamika, proses, dan implementasi perencanaan pembangunan inklusif di dalam ranah perencanaan tata ruang dan kebijakan publik.

Gambar 1. Identifikasi data Publikasi Socopus dan Google Scholar berbasis Protokol PRISMA



1. *Identification/* Identifikasi

Ekstraksi data awal dari basis data Scopus dan Google Scholar/Crossref menghasilkan 2.081 dokumen ilmiah (n = 2.081). Proses pembersihan data (*data cleaning*) yang dilakukan setelahnya mengeliminasi 705 entri yang terduplikasi (n = 705).

2. *Screening/* Penyaringan

Sebanyak 1.376 artikel yang tersisa (n = 1.376) di saring kembali berdasarkan relevansi judul, abstrak, dan kata kunci. Tahapan ini mengeliminasi 1.324 artikel yang tidak memenuhi kriteria inklusi (n = 1.324), sehingga menyisakan 52 artikel untuk ditinjau lebih lanjut (n = 52).

3. *Eligibility/* Kelayakan

Sebanyak 52 artikel yang tersisa dievaluasi kelayakannya melalui peninjauan teks lengkap secara menyeluruh (*full-text review*) (n = 52). Dari jumlah tersebut, 21 artikel dieksklusi karena naskah lengkapnya tidak dapat diakses atau tidak menyediakan opsi akses terbuka (*open access*) (n = 21).

- Kriteria Inklusi: (1) Artikel jurnal asli hasil tinjauan sejawat (*peer-reviewed*); (2) dipublikasikan dalam kurun waktu satu dekade terakhir (2014–2024); (3) fokus pada dinamika, proses, dan implementasi perencanaan pembangunan inklusif atau partisipasi public.
- Kriteria Eksklusi: (1) Dokumen berupa bab buku, atau naskah konferensi; (2) artikel yang tidak tersedia dalam versi teks lengkap (*full-text*) atau tidak menyediakan opsi akses terbuka (*open access*) ; (3) literatur yang hanya membahas pertumbuhan ekonomi tanpa dimensi sosial dan ekologis



#### 4. *Included/ Inclusion*

Setelah melalui tahapan identifikasi, penyaringan, dan penilaian kelayakan, sebanyak 31 artikel dinyatakan memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan secara penuh. Sebanyak 31 studi ini diinklusi sebagai kumpulan data utama (*primary dataset*) untuk sintesis dan analisis kualitatif yang mendalam ( $n = 31$ ).

Tahap akhir ini ( $n=31$ ) yang dinyatakan memenuhi seluruh kriteria kelayakan. Penentuan jumlah sampel ini didasarkan pada prinsip *information power* sebagaimana dirumuskan oleh Malterud et al. (2016), di mana validitas penelitian kualitatif tidak ditentukan oleh kuantitas statistik, melainkan oleh kekayaan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Angka 31 dinilai telah mencapai kejenuhan tematik (*thematic saturation*) yang memadai untuk mendekonstruksi interaksi sosial rumit dalam ekosistem perencanaan partisipatif serta menjembatani celah antara anteseden dan konsekuensi kebijakan yang selama ini terfragmentasi dalam literatur.

### 3.3 Teknik Analisis Data

Dalam metodologi Tinjauan Literatur Sistematis (*Systematic Literature Review/SLR*), berbagai teknik analisis data dapat diterapkan bergantung pada tujuan penelitian. Pendekatan yang umum digunakan mencakup meta-analisis untuk sintesis statistik (Cooper, 2015), (Saks, 2023), analisis bibliometrik untuk memetakan jaringan literatur, serta analisis isi (*content analysis*) yang memanfaatkan pengodean sistematis untuk mengidentifikasi pola data kualitatif (Krippendorff, 2004). Penelitian ini mengadopsi analisis tematik (*thematic analysis*), yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan pola atau tema yang berulang di dalam data guna memahami keberagaman pengalaman serta determinan kontekstual yang membentuk dinamika perencanaan pembangunan inklusif (Mudzakkir et al., 2022).

Prosedur analisis dimulai dengan pemahaman mendalam (*in-depth immersion*) terhadap data kualitatif yang telah dikompilasi untuk menghasilkan kode-kode awal yang merepresentasikan konsep atau gagasan yang berulang (Fraser & Walberg, 1991), (Oliver, 1980). Guna menjamin kualitas tinjauan, penelitian ini menerapkan protokol pengodean yang ketat dan transparan, khususnya melalui penyusunan kode (*codebook*) untuk memastikan replikabilitas proses pengodean dalam penelitian kualitatif (Roberts et al., 2019). Seluruh tahapan analisis dijalankan dengan kepatuhan ketat terhadap standar etika akademik untuk menjaga kredibilitas temuan yang disintesis (Arifin, 2018).

Selanjutnya, literatur perencanaan pembangunan inklusif dianalisis melalui lensa anteseden dan konsekuensi (*antecedents and consequences*) (Putra et al., 2025), dengan mengadaptasi kerangka kerja yang dikembangkan oleh Putra et al. (2025). Struktur analisis ini mencakup:

1. Analisis Anteseden (*Antecedent Analysis*): Mencakup faktor individu (niat berpartisipasi, keterampilan kepemimpinan, dan motivasi), faktor organisasi (lembaga pendukung, jaringan bisnis, dan model tata kelola), serta faktor lingkungan (konteks sosial, regulasi daerah, dan dinamika ekonomi global).
2. Pemeriksaan Konsekuensi (*Consequence Examination*): Dibagi menjadi hasil kinerja (pembangunan ekonomi lokal, keberhasilan perencanaan, dan pemberdayaan masyarakat) dan penilaian tantangan atau non-kinerja (strategi mengatasi krisis, hambatan struktural, dan kepuasan hidup warga).
3. Analisis Moderator dan Mediator (*Moderator and Mediator Analysis*): Memeriksa faktor-faktor seperti keterikatan sosial (*social embeddedness*), modal sosial, kapasitas dukungan institusional, dan konektivitas jaringan yang memengaruhi hubungan antara anteseden dan hasil pembangunan inklusif.

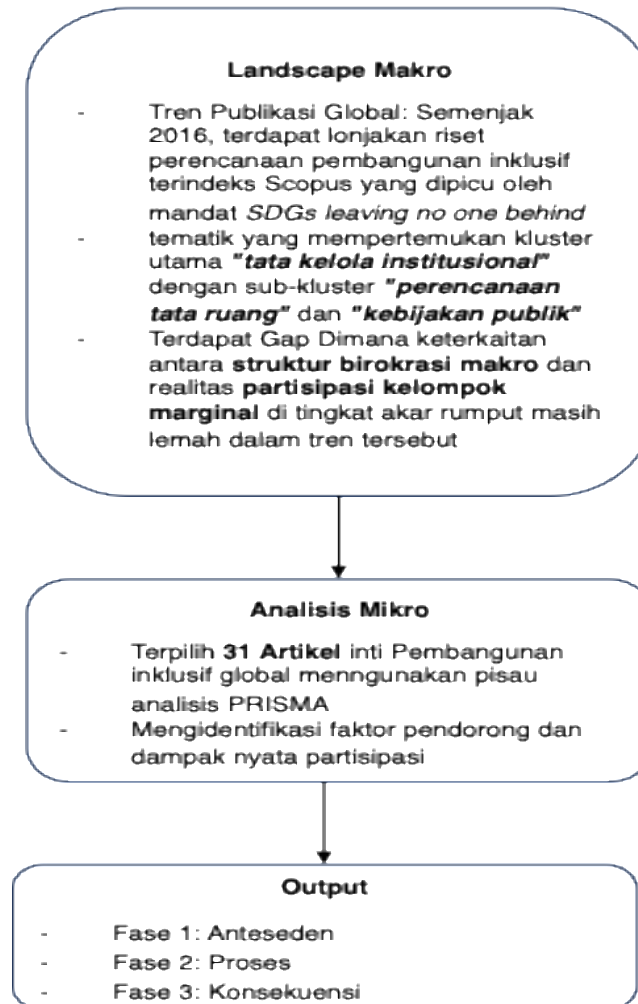
Untuk meminimalkan bias dan menjamin objektivitas, penelitian ini menerapkan strategi pencarian yang komprehensif guna mencegah terlewatnya penelitian yang relevan, termasuk studi dengan temuan negatif. Literatur abu-abu (*gray literature*) diintegrasikan untuk mengatasi bias publikasi, sehingga mampu menawarkan perspektif yang seimbang antara teori dan praktik (Paez, 2017). Terakhir, karakteristik seperti ukuran sampel dan kualitas studi dievaluasi secara sistematis untuk mengidentifikasi bias pelaporan, yang pada akhirnya menghasilkan sintesis yang lebih objektif.

### 4. Hasil Penelitian

Dalam rangka mencari integrasi logis antar tahapan temuan hasil menuju sintesis akhir penelitian, peta bibliometrik di tahap awal berfungsi mengidentifikasi tren global dan membongkar celah literatur mengenai terpisahnya tata kelola

institusional dari kesejahteraan akar rumput. Kekosongan tersebut selanjutnya dibedah secara mendalam melalui *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 31 artikel inti guna mengekstraksi variabel spesifik pendorong dan dampaknya. Jalinan antara pemetaan kuantitatif dan analisis kualitatif inilah yang secara langsung mendasari konstruksi kerangka konseptual tiga fase (anteseden, proses, dan konsekuensi), sekaligus menegaskan bahwa model yang ditawarkan bukan sekadar asumsi teoretis, melainkan berakar kuat pada bukti literatur yang teruji.

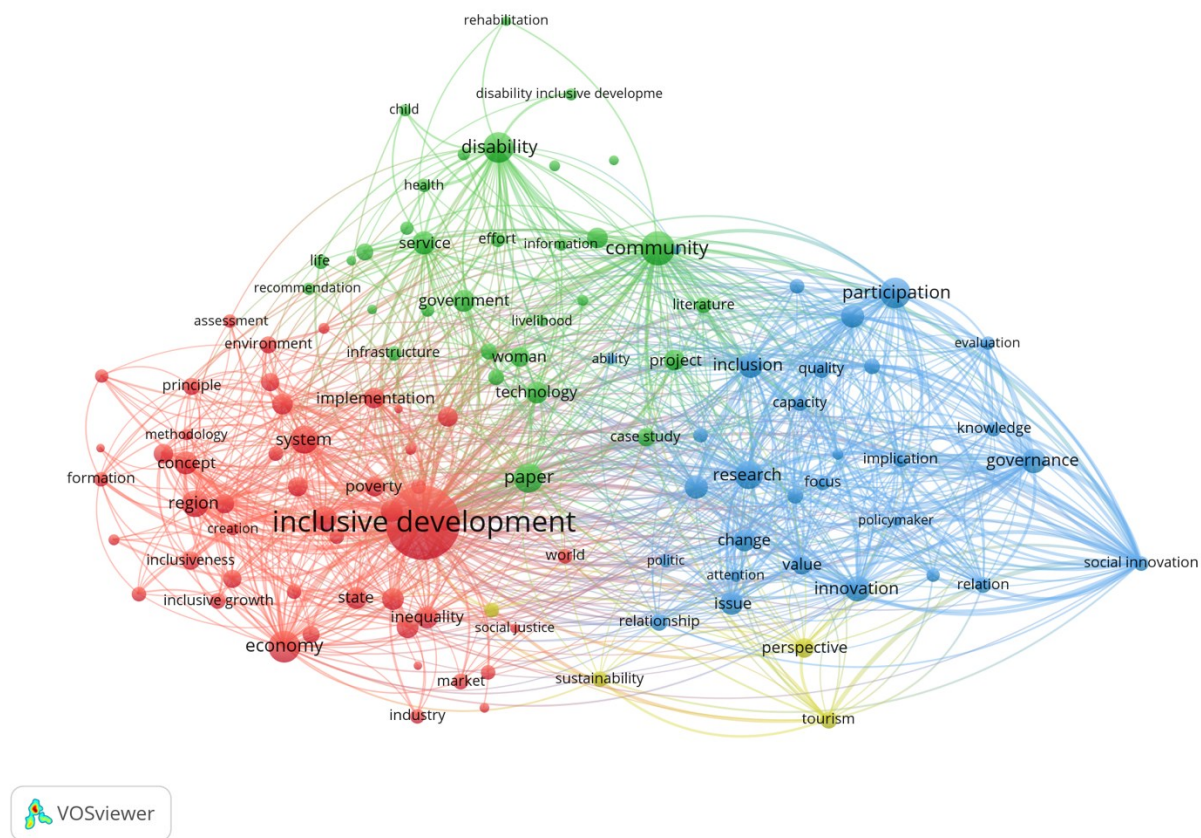
Gambar 2. Alur Integrasi Temuan Bibliometrik dan *Systematic Literature Review* (SLR)



#### 4.1 *Landscape Makro (Bibliometrik)*

Proses identifikasi dalam tinjauan sistematis ini dimulai dengan penarikan 2.081 catatan artikel dari basis data Scopus, dan Google Scholar/Crossref yang kemudian disaring menjadi 1.376 artikel setelah prosedur eliminasi duplikasi (*deduplication*). Fenomena ini merefleksikan perluasan minat akademik yang stabil serta lonjakan signifikan dalam luaran penelitian terkait dinamika inklusivitas selama beberapa tahun terakhir (Putra et al., 2025). Berdasarkan analisis bibliometrik yang dijalankan melalui VOSviewer, istilah "*inclusive development*" (pembangunan inklusif) muncul sebagai nodus sentral (*central node*) yang menghubungkan tiga klaster tematik utama: klaster ekonomi dan sistemik (merah), partisipasi dan tata kelola (biru), serta aktor terpinggirkan seperti perempuan dan penyandang disabilitas (hijau). Pemetaan lanskap makro ini mengonfirmasi bahwa diskursus perencanaan pembangunan inklusif kontemporer sangat bergantung pada integrasi teknologi digital dan *capturing data* (*data sensing*) untuk memantau layanan perkotaan sekaligus mendorong keterlibatan warga (Sha et al., 2024).

Gambar 3. Analisis Bibliometriks menggunakan Vos Viewer



Analisis terhadap literatur yang dikumpulkan menunjukkan bahwa definisi perencanaan pembangunan inklusif bervariasi secara signifikan bergantung pada konteks spasial, struktur sosio-ekonomi, dan dinamika budaya lokal (Asibey et al., 2026; Putra et al., 2025). Di wilayah-wilayah maju, konseptualisasi pembangunan sering kali menekankan pada keterikatan tempat (*placial embeddedness*) dan jejaring strategis; sebaliknya, di negara-negara berkembang, fokus utama berpusat pada upaya mengatasi hambatan sosio-spasial, kekosongan institusional (*institutional voids*), serta penguatan modal sosial di tengah kondisi kelangkaan sumber daya (Putra et al., 2025). Pembangunan inklusif kini dipahami bukan sekadar pertumbuhan ekonomi murni dengan mengintegrasikan dimensi keberlanjutan ekologis guna melindungi ekosistem (*ecosystem services*) bagi kelompok rentan, khususnya dalam era Antroposen (*Anthropocene epoch*) (Gupta et al., 2015), (Kooy et al., 2018). Pergeseran paradigma ini menuntut adanya transisi dari retorika prosedural menuju aktualisasi kewarganegaraan substantif (*substantive citizenship*) menggeser pemaknaan "warga kota" dari sekadar status legal-formal (kepemilikan KTP atau sertifikat tanah formal) menuju pengakuan hak-hak hidup yang nyata di ruang perkotaan sehingga menjamin adanya dinamika pembagian kekuasaan (*power-sharing*) di tingkat akar rumput.

Dari 1.376 artikel yang masuk ke tahap penyaringan awal, 52 artikel dinyatakan layak untuk peninjauan teks lengkap (*full-text review*), hingga akhirnya menghasilkan 31 artikel final yang sepenuhnya memenuhi kriteria inklusifitas pembangunan. Pemilihan 31 artikel inti ini didasarkan pada kecukupan daya informasi yang diperlukan untuk mendekonstruksi interaksi sosial yang rumit di dalam ekosistem perencanaan partisipatif (Malterud et al., 2016). Fokus pada sampel ini dimaksudkan untuk mengisi celah literatur, mengingat penelitian terdahulu jarang menyediakan sintesis terintegrasi yang menghubungkan anteseden dari keterlibatan kelompok marginal dengan konsekuensi nyata dari kebijakan tersebut (Dywili & Draai, 2019). Dengan mengonsolidasikan dinamika tata kelola lokal dari berbagai konteks global, analisis ini berupaya menjembatani keterputusan (*disconnect*) antara retorika partisipasi demokratis dan kesejahteraan empiris dari populasi yang terpinggirkan.

Tabel 2: Paper yang berdampak Tinggi terhadap Literatur Pembangunan Inklusif

Paper	DOI	Total Sitasi	Total Sitasi Per Tahun	Tahun
<i>Sustainable development goals and inclusive development.</i>  (Gupta & Vegelin, 2016)	10.1007/s10784-016-9323-z	1.606	160.6	2016
<i>Towards an elaborated theory of inclusive development</i>  (Gupta et al., 2015)	10.1057/ejdr.2015.30	679	61.73	2015
<i>Inclusive growth and inclusive development: A review and synthesis of Asian Development Bank literature</i>  (Rauniyar & Kanbur, 2010)	10.1080/13547860.2010.517680	462	28.88	2010
<i>Environmental degradation, ICT and inclusive development in Sub-Saharan Africa</i>  (Asongu et al., 2017)	10.1016/j.enpol.2017.09.049	325	36.11	2017
<i>Smart city as a social transition towards inclusive development through technology: A tale of four smart cities</i>  (Lee et al., 2023)	10.1080/12265934.2022.2074076	229	76.33	2023
<i>Inclusive and regenerative urban tourism: Capacity development perspectives</i>  (Bellato & Cheer, 2021)	10.1108/IJTC-08-2020-0167	167	33.40	2021
<i>Empowerment and participation: Key strategies for inclusive development</i>  (Ahmad & Islam, 2024)	10.1108/978-1-83549-174-420241003	86	43	2024
<i>Inclusive development and the asymmetric state: big projects and local communities in the Brazilian Amazon</i>  (Abers et al., 2017)	10.1080/00220388.2016.1208177	69	7.67	2017



<i>Urban water governance for more inclusive development: A reflection on the 'waterscapes' of Durban, South Africa</i>	DOI 10.1057/ejdr.2015.49	69	6.27	2015
<i>(Sutherland et al., 2015)</i>				
<i>The national development plan (NDP): A comparative analysis with the reconstruction and development programme (RDP), the growth, employment and redistribution</i>	10.10520/EJC164758	62	5.17	2014
<i>(Moyo &amp; Mamobolo, 2014)</i>				

Evaluasi terhadap lanskap penelitian pembangunan inklusif dimulai dengan mengidentifikasi dokumen-dokumen yang memegang otoritas intelektual paling signifikan berdasarkan metrik sitasi global. Pemanfaatan analisis sitasi sangat krusial untuk memetakan naskah-naskah yang berfungsi sebagai landasan teoretis utama, mengingat lonjakan masif dalam luaran penelitian selama dekade terakhir menuntut adanya penyaringan terhadap literatur yang berdampak tinggi (*high-impact literature*). Dengan mengidentifikasi artikel yang paling sering disitasi, studi ini dapat mengevaluasi bagaimana variabel-variabel kunci, seperti partisipasi substantif dan keadilan ekologis, diposisikan di dalam diskursus akademik arus utama (*mainstream*). Penyajian sepuluh artikel teratas pada tabel berikut bertujuan untuk membangun fondasi kuantitatif yang kokoh guna menjustifikasi temuan-temuan regional yang akan dibedah secara kualitatif pada tahapan berikutnya.

Profil literatur yang tertera pada Tabel 2 menunjukkan bahwa diskursus pembangunan inklusif global sangat bergantung pada integrasi antara tujuan kesejahteraan sosial dan batas-batasan ekologis (*ecological boundaries*) (Gupta & Vegelin, 2016) Metrik sitasi yang tinggi dari karya-karya fundamental ini menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk bergeser dari pertumbuhan ekonomi murni menuju penjaminan hak-hak dasar serta perlindungan ruang ekologis (*ecospace*) bagi kelompok marginal di era Antroposen (Gupta et al., 2015). Selain itu, literatur dari lembaga pembangunan internasional memainkan peran kunci dalam menstandarisasi pembangunan inklusif, menjembatani makroekonomi dan mikroekonomi guna menjamin pertumbuhan yang disertai dengan kesetaraan kesempatan (Rauniyar & Kanbur, 2010).

Selama dekade terakhir, penelitian pembangunan inklusif telah berkembang dengan menggabungkan teknologi digital dan inovasi berbasis sektor sebagai penggerak utama inklusivitas di wilayah-wilayah berkembang. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dipandang sangat vital untuk memitigasi degradasi lingkungan sekaligus mempromosikan pertumbuhan inklusif di kawasan-kawasan seperti Sub-Sahara Afrika (Asongu et al., 2017). Sementara itu, transisi menuju kota cerdas (*smart cities*) berfungsi sebagai mekanisme perubahan sosial yang memperluas keterlibatan warga melalui teknologi dan *capturing data* (data sensing) (Lee et al., 2023). Diversifikasi ini juga terlihat nyata dalam sektor pariwisata perkotaan, yang kian menekankan pada peningkatan kapasitas (*capacity building*) dan jalur pembangunan berkelanjutan guna memastikan masyarakat lokal menangkap manfaat ekonomi secara langsung (Bellato & Cheer, 2021).

Meskipun fondasi teoretis global telah mapan, tantangan inti yang diidentifikasi oleh literatur paling berpengaruh secara konsisten berakar pada asimetri kekuasaan (*power asymmetries*) antara negara dan masyarakat lokal. Dinamika kekuasaan yang timpang ini sering kali menghambat kapasitas negara untuk mendistribusikan proyek pembangunan secara adil, sebagaimana ditunjukkan oleh studi kasus di wilayah Amazon (Abers et al., 2017). Sebagai contoh, tata kelola fasilitas dasar seperti air perkotaan di Durban menjadi lensa yang jelas untuk mengevaluasi apakah kebijakan publik secara efektif mengakomodasi keberagaman bentang air lokal (*localized waterscapes*) atau, sebaliknya, justru memperkuat pembagian spasial yang sudah ada sebelumnya (Sutherland et al., 2015) Konsekuensinya, adopsi strategi

pemberdayaan dan partisipasi substantif diposisikan sebagai prasyarat mutlak untuk menjembatani keterputusan antara retorika kebijakan inklusif dan kesejahteraan empiris dari kelompok marginal di lapangan.

Setelah memetakan lanskap otoritas literatur global melalui metrik sitasi pada Tabel 2, bagian berikutnya menyajikan pembedahan mendalam mengenai bagaimana temuan awal sebanyak 2.081 artikel disaring secara sistematis hingga menghasilkan 31 artikel final untuk mengonseptualisasikan pembangunan inklusif secara operasional pada Tabel 3.

#### 4.2 Dinamika Konseptual: Pluralitas Definisi Pembangunan Inklusif Lintas Dimensi Geografis, Ekonomi, dan Sosio-Budaya

Definisi perencanaan pembangunan inklusif di dalam literatur global tidak bersifat universal; melainkan muncul sebagai sebuah konsep yang sangat terikat pada konteks (*context-bound concept*) yang dibentuk oleh sejarah lokal, struktur ekonomi, dan dinamika sosial masyarakat (Asibey et al., 2026; Putra et al., 2025; Sha et al., 2024). Analisis terhadap 31 artikel yang terpilih menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang jelas, dari sekadar pemenuhan kebutuhan material menuju penguatan agensi manusia (*human agency*) dan hak-hak asasi manusia yang fundamental (Gupta et al., 2015; Rauniyar & Kanbur, 2010). Di dalam dimensi geografis, definisi-definisi yang ada cenderung menggarisbawahi kedaulatan spasial (*spatial sovereignty*) dan adaptasi terhadap kerentanan lingkungan, seperti kenaikan permukaan air laut di kawasan pesisir Indonesia (Triyanti et al., 2017).

Sementara itu, di dalam dimensi ekonomi, fokus utama diarahkan pada instrumen fiskal dan pola pertumbuhan yang memihak kaum miskin (*pro-poor growth*) yang mengalokasikan kesempatan setara bagi rumah tangga pedesaan berpenghasilan rendah (Hutter, 2007), (Fernando, 2008). Terakhir, dimensi sosio-budaya mengonseptualisasikan pembangunan inklusif sebagai upaya sistemik untuk mewujudkan kewarganegaraan substantif (*menggeser pemaknaan "warga kota" dari sekadar status legal-formal (kepemilikan KTP atau sertifikat tanah formal) menuju pengakuan hak-hak hidup yang nyata di ruang perkotaan*) dan pengakuan formal terhadap identitas-identitas yang terpinggirkan (Asibey et al., 2026; Fon et al., 2026).

Tabel 3. Taksonomi Konseptual Pembangunan Inklusif: Sintesis dari 31 Studi Inti

Author (Year)	Fokus Dimensi	Definisi Operasional dan Elemen Kunci
(Gupta & Vegelin, 2016)	Karakter Multidimensi Pembangunan Inklusif: Pendekatan Sosial, Ekologis, dan Relasional	<b>Definisi Operasional:</b> Pembangunan inklusif adalah suatu proses pembangunan terintegrasi yang menyatukan kelompok-kelompok marginal ke dalam ranah sosial, politik, dan ekonomi guna mendorong kesejahteraan manusia ( <i>human well-being</i> ) sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan ( <i>environmental sustainability</i> ).  <b>Elemen Kunci:</b> Perlindungan Ruang Ekologis, Pembagian Beban Risiko, Pemberdayaan Agensi
(Rauniyar & Kanbur, 2010)	Ekonomi dan Institusional	<b>Definisi Operasional:</b> Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah suatu proses ekspansi ekonomi yang berjalan beriringan dengan penyediaan kesempatan yang setara ( <i>equitable opportunities</i> ) bagi seluruh segmen masyarakat.  <b>Elemen Kunci:</b> Aksesibilitas Aset Produktif, Mekanisme Perlindungan Sosial, Eliminasi Hambatan Kebijakan
(Sha et al., 2024)	Teknologi dan Spasial	<b>Definisi Operasional:</b> Transformasi urban inklusif adalah suatu proses perubahan perkotaan yang digerakkan oleh teknologi disruptif guna meningkatkan pemberian layanan publik sekaligus mengamankan hak-hak digital ( <i>digital</i> )



		rights) warga negara.
		<b>Elemen Kunci</b> Literasi Digital, Arsitektur Tata Kelola Adaptif, Partisipasi Warga Berbasis Data.
(Asibey et al., 2026)	Geographical (Perkotaan)	<b>Definisi Operasional:</b> Paradigma perencanaan inklusif adalah sebuah model perencanaan wilayah yang menjamin akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan bagi seluruh penduduk, dengan secara eksplisit mengintegrasikan permukiman liar ke dalam sistem perkotaan.
		<b>Elemen Kunci</b> Desentralisasi Otoritas, Kewarganegaraan Substantif
(Triyanti et al., 2017)	Geographical (Pesisir)	<b>Definisi Operasional:</b> Kerangka adaptasi kawasan pesisir inklusif adalah suatu sistem adaptasi wilayah pantai yang menyatukan secara strategis modal sosial ( <i>social capital</i> ) lokal dengan pendekatan berbasis ekosistem ( <i>ecosystem-based approaches</i> ).
		<b>Elemen Kunci:</b> Model Tata Kelola Interaktif, Restorasi Mangrove Berbasis Komunitas
(Kooy et al., 2018)	Tata Kelola Air Berbasis Ekologis	<b>Definisi Operasional:</b> Tata kelola air ekologis adalah suatu sistem pemenuhan hak dan akses yang adil terhadap aset air bersih bagi seluruh lapisan masyarakat, yang dibatasi secara ketat oleh batas-batas ekologis ( <i>ecological boundaries</i> ) dari sistem hidrologi setempat.
		<b>Key Elements:</b> Model Tata Kelola Interaktif, batas-batas ekologis
(Diprose et al., 2020)	Sosial Budaya (Gender)	<b>Definisi Operasional:</b> Pengarusutamaan gender sistemik adalah suatu proses integrasi perspektif gender secara menyeluruh ke dalam kebijakan pembangunan desa yang digerakkan oleh aksi kolektif perempuan ( <i>women's collective action</i> ).
		<b>Key Elements:</b> Akselerasi Kerangka Kerja 4R ( <i>Resources, Roles, Rights, Representation</i> ).
(Keep et al., 2021)	Sosial dan Kemasyarakatan	<b>Definisi Operasional:</b> Mitigasi sosial adalah suatu upaya sistematis untuk mengentaskan keterpinggiran masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak dan bermartabat ( <i>dignified housing</i> ), sekaligus menumbuhkan ketahanan komunitas ( <i>community resilience</i> ) terhadap guncangan sistemik dari luar.
		<b>Elemen Kunci:</b> Kohesi Sosial, Perlawanan Kolektif terhadap Eksklusi Neoliberal
(Hickey, 2013)	Politik	<b>Definisi Operasional:</b> Hasil struktural ( <i>structural outcomes</i> ) adalah produk institusional yang lahir dari kesepakatan politik progresif ( <i>progressive political</i>

		<p><i>settlements</i>), yang berhasil mengunci komitmen kelompok elit untuk menjamin distribusi kesejahteraan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.</p> <p><b>Elemen Kunci:</b> Kapasitas Birokrasi Negara, Akuntabilitas ke Bawah, Keadilan Relasional</p>
<b>(Ekins et al., 2019)</b>	Sosial dan Lingkungan	<p><b>Definisi Operasional:</b> Resolusi konflik secara konstruktif adalah sebuah proses penyelesaian sengketa tata ruang yang dicapai dengan melibatkan seluruh strata masyarakat secara bermakna dalam perencanaan kawasan strategis nasional, guna memitigasi risiko penggusuran, asimetri informasi, dan marjinalisasi sosial.</p> <p><b>Elemen Kunci:</b> Struktur Sosial Adaptif, Pelestarian Budaya, Ekosistem Kota Hutan Cerdas</p>
<b>(Ahmad &amp; Islam, 2024)</b>	Sosial Budaya	<p><b>Definisi Operasional:</b> Pemberdayaan akar rumput (<i>grassroots empowerment</i>) adalah suatu strategi penguatan kapasitas komunitas lokal yang menempatkan partisipasi aktif dan otentik sebagai prasyarat mutlak (<i>absolute prerequisites</i>) demi terwujudnya alur pembangunan yang inklusif.</p> <p><b>Elemen Kunci:</b> Penguatan Agensi Lokal, Inklusi Politik Struktural.</p>
<b>(Singh &amp; Kumar, 2020)</b>	Budaya dan Spasial	<p><b>Definisi Operasional:</b> Kerangka perencanaan warisan budaya urban (<i>urban heritage planning frameworks</i>) adalah suatu sistem penataan ruang kota yang menyatukan secara selaras antara konservasi identitas sejarah dengan tuntutan modernisasi kontemporer.</p> <p><b>Elemen Kunci:</b> Hak atas Warisan Budaya, Perlindungan Kohesi Sosial.</p>
<b>(Asongu et al., 2017)</b>	Ekonomi dan Lingkungan	<p><b>Definisi Operasional:</b> Penyebaran strategis inovasi TIK (Strategic deployment of ICT innovations) adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara terarah untuk memitigasi degradasi lingkungan sekaligus mempercepat ekspansi ekonomi yang inklusif di negara-negara berkembang.</p> <p><b>Elemen Kunci:</b> Jalur Mitigasi Ekologis, Inklusi Ekonomi Berbasis Teknologi</p>
<b>(Bellato &amp; Cheer, 2021)</b>	Pariwisata	<p><b>Definisi Operasional:</b> Kerangka pariwisata regeneratif adalah suatu sistem pengelolaan destinasi yang secara eksplisit memprioritaskan indeks peningkatan kapasitas (<i>capacity-building index</i>) dari komunitas lokal sebagai aktor sekaligus penerima manfaat utama.</p>



		<b>Elemen Kunci:</b> Pengelolaan Destinasi yang Inklusif, Keberlanjutan Sosio-Kultural
<b>(Chu et al., 2017)</b>	Geographical (Iklim dan Cuaca)	<b>Definisi Operasional:</b> Pengarusutamaan iklim sistemik ( <i>systemic climate mainstreaming</i> ) adalah proses pengintegrasian mandat adaptasi perubahan iklim secara menyeluruh ke dalam dokumen perencanaan pembangunan formal negara guna melindungi populasi yang paling rentan.
<b>(Jones &amp; Comfort, 2020)</b>	Institutional	<b>Elemen Kunci:</b> Ketahanan Iklim dan Keadilan Prosedural <b>Definisi Operasional:</b> Pelibatan publik otentik ( <i>genuine public engagement</i> ) adalah proses pelibatan masyarakat secara nyata, jujur, dan mendalam di dalam perencanaan pembangunan tingkat komunitas yang dirancang khusus untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang paling mendasar.
<b>(Sachs, 2004)</b>	Global & Makro	<b>Elemen Kunci:</b> Tata Kelola yang Bersih serta Transparan, dan Partisipasi Warga yang Kuat <b>Definisi Operasional:</b> Strategi makroekonomi dan spasial inklusif adalah kebijakan pembangunan terintegrasi yang memprioritaskan "pembangunan dari dalam" ( <i>development from within</i> ), yang dirancang secara struktural untuk melindungi ( <i>shelter</i> ) warga negara dari ketimpangan sistemik akibat arus globalisasi.
<b>(Abers et al., 2017)</b>	Institutional (Negara)	<b>Elemen Kunci:</b> Hak Kewarganegaraan yang Komprehensif, dan Mekanisme Demokrasi Langsung <b>Definisi Operasional:</b> Negosiasi kekuasaan dinamis ( <i>dynamic power negotiations</i> ) adalah proses perebutan, tawar-menawar, dan penyesuaian ruang kuasa secara terus-menerus di dalam pelaksanaan mega-proyek negara yang ditujukan untuk melindungi kepentingan sosial-ekonomi komunitas lokal secara aktif.
<b>(Moyo &amp; Mamobolo, 2014)</b>	Ekonomi Politik	<b>Elemen Kunci:</b> Perlawanan terhadap Asimetri Kekuasaan dan Mendorong Inklusi Relasional <b>Definisi Operasional:</b> Definisi ini menekankan bahwa evaluasi keberhasilan suatu negara tidak boleh dilakukan dalam isolasi, melainkan harus dikontrasikan dengan model negara lain ( <i>cross-national analysis</i> ). Tujuannya adalah memetik pelajaran empiris tentang bagaimana intervensi negara dapat mengubah arsitektur ekonomi agar lebih memihak rakyat melalui dua elemen kunci
<b>(Liu et al., 2022)</b>	Spasial dan Lingkungan	<b>Elemen Kunci:</b> Transformasi Ekonomi Struktural, Instrumen Kebijakan Inklusif <b>Definisi Operasional:</b> Evaluasi strategis intervensi pembaruan urban ( <i>urban renewal interventions</i> ) adalah

---

sebuah proses penilaian komprehensif yang secara khusus memanfaatkan metrik kesejahteraan kognitif dan perlindungan terarah (*targeted safeguards*) guna menjamin keamanan spasial maupun mental populasi yang rentan.

**Key Elements:** Indeks Inklusivitas Masyarakat Rentan, dan Strategi Mitigasi Ketimpangan kesejahteraan

---

Analisis terhadap 31 artikel akhir mengungkapkan bahwa pembangunan inklusif bukanlah sebuah konsep yang statis; melainkan sebuah fenomena yang sangat terikat dengan konteks dan menunjukkan tiga lintasan evolusi yang jelas:

1. **Dari "Pertumbuhan Inklusif" menuju "Pembangunan Inklusif" (Pergeseran Paradigma Ekonomi):** Literatur dasar, seperti Rauniyar & Kanbur (2010), cenderung menempatkan inklusivitas sebagai akibat wajar dari pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan inklusif) yang dicapai melalui penciptaan lapangan kerja dan efisiensi pasar. Sebaliknya, para sarjana kontemporer (Gupta et al., 2015) memberikan kritik yang tajam, dengan argumen bahwa ketergantungan yang berlebihan pada metrik PDB sering kali memperburuk ketimpangan struktural. Mereka mendefinisikan ulang pembangunan inklusif sebagai prioritas mutlak atas kesejahteraan bio-psikososial dan perlindungan hak asasi manusia yang paling mendasari elemen-elemen yang ekspansi ekonomi.
2. **Keadilan Ekologis dalam Epok Antroposen (Lintasan Geografis):** Terdapat perbedaan geografis yang sangat mencolok dalam mendefinisikan inklusivitas. Di wilayah pesisir, seperti pedesaan Indonesia, inklusivitas didefinisikan melalui keberlangsungan ekologis yang terkait erat secara tidak terpisahkan dengan modal sosial lokal (Triyanti et al., 2017). Sebaliknya, di dalam kota besar seperti Jakarta dan Durban, fokus analisis bergeser ke arah politik akses utilitas dasar (misalnya air bersih), yang sering kali terfragmentasi oleh mekanisme privatisasi. Temuan ini menegaskan bahwa tanpa adanya inklusi ekologis, kesejahteraan sosial populasi marjinal akan tetap selamanya rentan terhadap krisis lingkungan..
3. **Inklusi Relasional: Melawan Asimetri Kekuasaan (Lintasan Institusional):** Wawasan yang paling kritis muncul di dalam dimensi relasional (Hickey, 2013; Abers et al., 2017). Rangkaian literatur ini menegaskan bahwa inklusi bergerak melampaui sekadar "mengundang partisipasi" di dalam forum formal yang bersifat dari atas ke bawah (seperti Musrenbang). Sebaliknya, inklusi merepresentasikan perjuangan struktural untuk membongkar asimetri kekuasaan antara aktor elite dan warga akar rumput. Di dalam kerangka kerja ini, inklusivitas didefinisikan sebagai aktualisasi dari kewargaan substantif, di mana kelompok marjinal (misalnya perempuan, penyandang disabilitas, penghuni kawasan kumuh) memiliki agensi untuk menentukan lintasan pembangunan wilayah mereka dan melawan eksklusi yang didorong oleh pasar modal global.

Ketiga lintasan ini menunjukkan bahwa pembangunan inklusif kontemporer berfungsi sebagai ekosistem perencanaan yang kompleks. Ekosistem ini menuntut keseimbangan yang sensitif antara inovasi teknologi (Sha et al., 2024), kedaulatan sumber daya (Kooy et al., 2016), dan transformasi struktural dari arena politik lokal (Diprose et al., 2020).

#### 4.3 Kerangka Kerja Integratif: Struktur Tematik dari Anteseden dan Konsekuensi dalam Perencanaan Pembangunan Inklusif

Sebuah sintesis dari 31 artikel inti mengungkapkan bahwa efikasi pembangunan inklusif tidak dapat dipahami melalui analisis yang terfragmentasi; melainkan berfungsi sebagai ekosistem perencanaan terintegrasi yang menghubungkan prasyarat administratif dengan realitas kesejahteraan akar rumput. Temuan ini menjawab celah krusial dalam literatur yang ada, yang sering kali memisahkan evaluasi proses birokrasi dari dampak nyata kebijakan terhadap populasi rentan. Dengan mengintegrasikan berbagai dinamika tata kelola lokal, penelitian ini menawarkan pemahaman holistik tentang bagaimana masukan perencanaan ditransformasikan menjadi hasil kesejahteraan melalui mekanisme anteseden dan konsekuensi empiris.

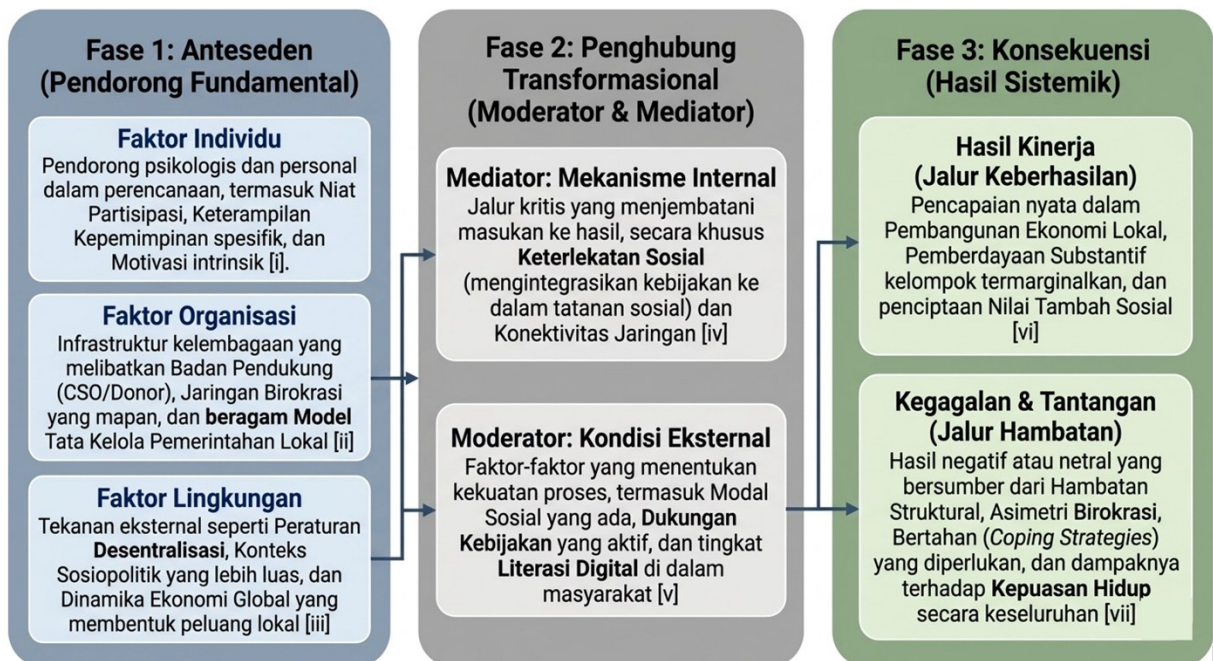
Pada tingkat individu, keberhasilan perencanaan sangat bergantung pada niat partisipatif dan kapasitas agensi dari kelompok marjinal. Literatur menunjukkan bahwa kesediaan warga untuk terlibat dalam forum formal, seperti Musrenbang, sangat tergantung pada persepsi mereka tentang relevansi kebijakan dan rasa percaya diri internal mereka, atau "kekuatan dari dalam" (*power within*). Keterampilan kepemimpinan komunitas dan motivasi intrinsik untuk memperjuangkan hak-hak marjinal terbukti menjadi pendorong utama yang memungkinkan populasi rentan untuk bertransisi dari sekadar penerima manfaat pasif menjadi aktor kunci dalam proses pengambilan keputusan.

Pada tingkat organisasi dan lingkungan, efikasi birokrasi dan regulasi desentralisasi memainkan peran penting dalam menjamin keberlanjutan inklusi. Peran lembaga pendukung, seperti NGO dan donor internasional, sering kali menjadi penentu krusial dalam menyediakan data partisipatif dan mendampingi warga selama negosiasi kekuasaan dengan para elite lokal. Namun, koordinasi antar-lembaga yang buruk dan intervensi politik tetap menjadi kendala lingkungan yang signifikan, di mana tumpang tindih mandat sering kali menyebabkan stagnasi implementasi kebijakan pembangunan inklusif di lapangan.

Hubungan antara anteseden dan hasil pembangunan bersifat non-linear, dimoderasi oleh modal sosial dan dimediasi oleh keterikatan jaringan lokal. Modal sosial, termasuk jaringan kepercayaan dan kerja sama timbal balik (*gotong-royong*), bertindak sebagai moderator yang memperkuat hubungan inklusif. Sementara itu, keterikatan sosial berfungsi sebagai mediator yang menjembatani hambatan geografis dan isolasi birokrasi. Tanpa mekanisme ini, masukan perencanaan yang kuat sering kali gagal menghasilkan hasil kesejahteraan karena adanya asimetri informasi yang mendalam di tingkat distrik dan desa.

Konsekuensi kinerja dari model integratif ini mencakup keberhasilan pembangunan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat yang nyata. Bukti empiris menunjukkan bahwa infrastruktur yang direncanakan secara partisipatif meningkatkan mobilitas ekonomi dan memperbaiki akses kelompok marjinal ke layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Pencapaian ini menghasilkan nilai ekonomi, memperkuat legitimasi pemerintah lokal, dan menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat yang kuat terhadap hasil pembangunan.

Gambar 4. Kerangka Kerja Integratif Perencanaan Pembangunan Inklusif (Anteseden dan Konsekuensi)



Sumber: Sintesis dari 31 Artikel Inti tentang Pembangunan Inklusif

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi konsekuensi non-kinerja atau tantangan struktural yang persisten. Asimetri birokrasi dan ketidakseimbangan kekuasaan sering kali menurunkan suara kelompok rentan menjadi sekadar

formalitas prosedural tanpa pengaruh nyata pada alokasi anggaran akhir. Hal ini mendorong strategi masyarakat, seperti penyediaan layanan secara mandiri atau perlawanan terhadap proyek-proyek dari atas ke bawah yang mengabaikan kebutuhan lokal dan berisiko menciptakan eksklusi sosial baru.

## 5. Pembahasan

### 5.1 Tantangan Teoretis dan Praktis dalam Studi Perencanaan Inklusif

Wacana seputar perencanaan pembangunan inklusif yang disarikan dari 31 artikel akhir menggarisbawahi bahwa fenomena ini pada hakikatnya terikat pada konteks dan tidak dapat disederhanakan secara berlebihan melalui pendekatan universal. Sebagaimana diidentifikasi dalam tinjauan literatur sistematis oleh Putra et al. (2025) mengenai kompleksitas pedesaan, tantangan utama dalam perencanaan inklusif terletak pada keragaman spasial, yang sering kali berbenturan dengan model tata kelola yang kaku. Perbedaan mencolok antara mandat adaptasi ekologis di wilayah pesisir Indonesia dan perjuangan untuk hak utilitas dasar di kota besar seperti Jakarta dan Durban menunjukkan bahwa dimensi geografis memainkan peran deterministik dalam membentuk operasionalisasi inklusivitas. Akibatnya, kegagalan teori-teori pembangunan arus utama dalam menangkap variasi lokal ini sering kali melahirkan "kekosongan institusional" (*institutional voids*), di mana regulasi formal terbukti tidak mampu merespons realitas kerentanan di tingkat akar rumput.

Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa hambatan paling persisten terhadap inklusi substantif bukanlah ketersediaan instrumen teknis, melainkan asimetri kekuasaan yang tertanam kuat dalam dinamika relasional antara negara dan masyarakat sipil. Di banyak negara berkembang, proses perencanaan sering kali menjadi korban dari "partisipasi tokenistik" (*tokenistic participation*), di mana keterlibatan warga negara diturunkan nilainya menjadi sekadar formalitas administratif tanpa adanya pengaruh nyata terhadap alokasi anggaran akhir. Studi kasus di seluruh Amazon dan Tanzania mengilustrasikan bagaimana proyek-proyek pembangunan skala besar secara rutin mengabaikan kepentingan komunitas lokal demi menguntungkan para elite politik dan pasar modal global, yang pada akhirnya memicu perlawanan akar rumput dan fragmentasi sosial. Inklusi relasional menuntut penyelarasan ulang yang radikal terhadap struktur kekuasaan sehingga kelompok marjinal, seperti perempuan dan penyandang disabilitas, memiliki agensi yang diakui secara hukum untuk melawan eksklusi dan mengarahkan lintasan pembangunan di wilayah mereka sendiri.

Tantangan praktis berikutnya termanifestasi sebagai kesenjangan implementasi yang lebar antara desain kebijakan progresif dan praktik politik informal di lapangan. Meskipun banyak negara telah mengadopsi kerangka kerja ambisius dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan regulasi desentralisasi, efikasi lokal mereka sering kali lumpuh oleh ketidakefisienan birokrasi, defisit kapasitas teknis, dan ketergantungan fiskal yang kronis pada pemerintah pusat. Ketidakberaturan data dan asimetri informasi semakin memperburuk kesenjangan dalam akses layanan publik, memaksa komunitas rentan untuk menerapkan strategi bertahan secara otonom di luar aparatur formal untuk bertahan hidup dari guncangan ekonomi dan lingkungan. Untuk menjembatani kesenjangan ini, model perencanaan ke depan harus mengintegrasikan inovasi teknologi digital secara mulus dengan modal sosial lokal, menempatkannya sebagai mediator baru yang memperkuat akuntabilitas dan transparansi di setiap siklus kebijakan publik.

### 5.2 Peluang Riset Masa Depan

Agenda penelitian masa depan harus memprioritaskan peran teknologi bukan sekadar sebagai instrumen infrastruktur teknis, melainkan sebagai mekanisme transisi sosial menuju pembangunan inklusif yang lebih substantif (Lee et al., 2023). Eksplorasi mendalam terhadap "Smart Citizenship" dan "Literasi Digital" harus diposisikan secara kritis sebagai mediator utama yang memungkinkan kelompok marjinal untuk mengomunikasikan kebutuhan mereka secara transparan dan dalam waktu nyata (*real-time*) (Sha et al., 2024). Studi-studi berikutnya perlu memperlebar fokus pada efisiensi layanan perkotaan untuk menyelidiki bagaimana platform digital dapat memfasilitasi dinamika pembagian kekuasaan secara otentik, guna memastikan bahwa partisipasi warga tidak lagi menjadi korban dari jebakan tokenisme birokrasi (Sha et al., 2024). Oleh karena itu, integrasi teknologi di masa depan diharapkan dapat menjembatani asimetri informasi antara para perencana dan komunitas rentan di wilayah berkembang.



Di luar dimensi teknologi, tantangan pembangunan di era Antroposen menuntut penempatan kembali ketahanan ekologis sebagai pilar fundamental dari penelitian pembangunan inklusif (Gupta & Bavinck, 2017). Penelitian masa depan harus menjadi lebih tajam dalam membedah keterkaitan struktural antara degradasi lingkungan dan eksklusi sosial, khususnya di wilayah yang sangat rentan seperti zona pesisir dan kota besar (Kooy et al., 2016; Sutherland et al., 2015). Lokus penelitian perlu diarahkan pada pengembangan mekanisme pembagian "ruang ekologis" (*ecospace*) yang adil, di mana hak-hak lingkungan, tanggung jawab, dan beban risiko didistribusikan secara adil lintas generasi dan kelas sosial (N. Pouw & Gupta, 2017). Transformasi paradigma penelitian dari sekadar "pertumbuhan hijau" (*green growth*) menjadi "pembangunan inklusif secara ekologis" (*ecologically inclusive development*) akan memberikan perspektif baru untuk melindungi keberlangsungan hidup kelompok rentan yang sangat bergantung pada jasa ekosistem alam (Gupta et al., 2021).

Terakhir, integrasi solusi digital dan ketahanan sosio-ekologis membentuk sebuah "lingkaran kebajikan" (*virtuous cycle*) yang mendesak untuk dieksplorasi melalui studi longitudinal empiris (Gupta et al., 2021; Putra et al., 2025). Sebagaimana disarankan oleh Putra et al. (2025) mengenai perlunya pemahaman kontekstual yang berkelanjutan, penelitian masa depan harus melacak bagaimana adopsi teknologi berbasis komunitas dapat meningkatkan ketahanan jangka panjang terhadap krisis ekonomi dan iklim. Evaluasi kritis terhadap pemanfaatan data besar (*big data*) diperlukan untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak memperkuat dominasi korporasi, melainkan mendukung otonomi lokal dalam mengelola sumber daya publik (Sha et al., 2024; Gupta et al., 2021). Pada akhirnya, masa depan studi pembangunan inklusif bergantung pada kemampuan kita untuk mengonseptualisasikan kembali perencanaan sebagai sebuah ekosistem terintegrasi yang menghargai kesejahteraan manusia dan regenerasi ekosistem sebagai barang publik yang utama (Bavinck & Gupta, 2017; Gupta et al., 2021).

### 5.3 Merekonseptualisasi Model Integratif

Berdasarkan sintesis model integratif yang diilustrasikan dalam Gambar 3, muncul empat implikasi strategis untuk kemajuan kebijakan publik yang inklusif:

1. **Transformasi Anteseden melalui Pemberdayaan Agensi dan Struktural:** The success Keberhasilan perencanaan inklusif tidak semata-mata bergantung pada regulasi desentralisasi; melainkan bertumpu pada interaksi antara kapasitas agensi individu (seperti keterampilan kepemimpinan) dan sistem pendukung organisasional, termasuk NGO dan penyandang dana. Kebijakan publik harus memprioritaskan rasa percaya diri kelompok marjinal untuk memungkinkan mereka menyuarakan aspirasi mereka secara substantif di dalam forum-forum formal. Tanpa komitmen dari para elite dan keterlibatan aktif dari lembaga-lembaga pendukung, faktor pendorong lingkungan sering kali gagal terwujud menjadi aksi kolektif yang berdampak.
2. **Menerapkan Moderator dan Mediator untuk Memitigasi Kesenjangan Implementasi:** Hubungan antara proses perencanaan dan hasil empiris pada hakikatnya bersifat non-linear, yang sangat dipengaruhi oleh modal sosial dan literasi digital yang bertindak sebagai variabel moderating. Modal sosial beroperasi sebagai jembatan kepercayaan yang memperkokoh legitimasi kebijakan, sementara literasi digital berfungsi sebagai prasyarat mutlak bagi warga negara untuk menavigasi layanan publik yang digerakkan oleh infrastruktur data. Pada saat yang sama, mekanisme intervensi seperti keterikatan sosial dan konektivitas jaringan terbukti sangat efektif dalam memitigasi risiko kegagalan birokrasi dan isolasi informasi lokal.
3. **Evaluasi Dampak: Menyeimbangkan Kinerja dan Kendala Struktural:** Konsekuensi kinerja dari perencanaan inklusif tidak boleh diukur secara kaku melalui indikator pertumbuhan makroekonomi; sebaliknya, hal tersebut harus dievaluasi melalui pemberdayaan substantif dan nilai tambah sosial yang dirasakan langsung oleh populasi rentan. Studi ini menggarisbawahi bahwa hasil kegagalan inklusi secara rutin dipicu oleh asimetri birokrasi dan hambatan struktural yang menurunkan masukan warga menjadi sekadar formalitas prosedural. Akibatnya, kebijakan pemulihan pascakrisis harus menolak pendekatan yang seragam (*one-size-fits-all*), yang pada dasarnya cenderung menciptakan bentuk-bentuk eksklusi sosial baru bagi masyarakat miskin di perkotaan dan pedesaan.

#### 4. **Rekayasa Kebijakan: Transisi dari Tokenisme menuju Pembagian Kekuasaan dalam Perencanaan Nasional:**

Model integratif ini memberikan rekomendasi kebijakan yang tegas untuk mentransformasi siklus Musrenbang; dari yang selama ini sekadar formalitas prosedur (tokenism), menjadi mekanisme pembagian kewenangan yang nyata dan diakui secara hukum. Untuk mewujudkannya, pemerintah daerah dan pemerintah desa perlu menerapkan tata kelola kolaboratif yang melembagakan hak-hak kelompok marginal, seperti perempuan dan penyandang disabilitas. Langkah ini dapat dieksekusi melalui penerapan kerangka kerja 4R (*Resources, Roles, Rights, Representation*) secara konsisten di dalam dokumen perencanaan tata ruang dan penganggaran. Lebih lanjut, pemanfaatan instrumen fiskal seperti Dana Desa tidak seharusnya terpaku pada pembangunan fisik semata. Dana tersebut harus diprioritaskan untuk membangun kapasitas masyarakat dan memperkuat keterlekatan sosial, sehingga mampu membongkar hambatan birokrasi yang selama ini menyumbat aspirasi akar rumput. Pada akhirnya, efektivitas perencanaan inklusif di Indonesia sangat bergantung pada transparansi anggaran dan komitmen politik (*political will*) pemerintah untuk mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan langsung kepada komunitas lokal demi mewujudkan pembangunan daerah yang tangguh dan berkeadilan.

## 6. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan pembangunan inklusif bukanlah konsep yang universal atau statis, melainkan sebuah fenomena yang terikat konteks dan didorong oleh dinamika geografis, ekonomi, dan sosial-budaya lokal. Berdasarkan tinjauan sistematis terhadap 31 studi global, penelitian ini mengidentifikasi pergeseran paradigma yang jelas dari sekadar pertumbuhan ekonomi (*inclusive growth*) menuju jaminan kesejahteraan bio-psikososial manusia, perlindungan ruang ekologis (*ecospace*), dan perwujudan kewarganegaraan substantif. Keragaman konseptual ini menunjukkan bagaimana berbagai wilayah secara strategis menyeimbangkan ambisi ekonomi dengan kebutuhan untuk melindungi kelompok marjinal dari risiko lingkungan dan kekosongan institusional.

Kerangka kerja integratif dari studi ini menjembatani kesenjangan literatur yang kritis dengan mengaitkan secara sistematis antara anteseden multilevel (agensi individu dan kapasitas organisasi) dengan konsekuensi di dunia nyata. Hubungan ini dimediasi dan dimoderasi oleh modal sosial dan literasi digital. Analisis penelitian ini membuktikan bahwa inklusi sejati menuntut kerangka kerja perencanaan untuk mengatasi asimetri kekuasaan dan kesenjangan implementasi melalui tata kelola yang transparan dan interaktif. Secara praktis, beralih dari tokenisme simbolis menuju pembagian kekuasaan yang nyata untuk membangun ekosistem perencanaan yang tangguh guna menjamin kesejahteraan jangka panjang bagi komunitas marjinal.

## Daftar Pustaka

- Abers, R. N., Oliveira, M. S. de, & Pereira, A. K. (2017). Inclusive development and the asymmetric state: big projects and local communities in the Brazilian Amazon. *The Journal of Development Studies*, 53(6), 857–872.
- Acharya, K. K., & Zafarullah, H. (2024). Whither demarginalization, inclusion and effectiveness? Challenges of local government planning in Nepal. *Millennial Asia*, 15(2), 216–235.
- Ahmad, I., & Islam, M. R. (2024). Empowerment and participation: Key strategies for inclusive development. In *Building strong communities: Ethical approaches to inclusive development* (pp. 47–68). Emerald Publishing Limited.
- Arifin, S. R. M. (2018). Ethical considerations in qualitative study. *International Journal of Care Scholars*, 1(2), 30–33.
- Asibey, M. O., Agyei, F., Okrah, M. N., & Blija, D. K. (2026). The politics of urban climate adaptation: informality, institutional action, and resilience in Ghana's cities. *Cities*, 172, 106832.



- Asongu, S. A., Le Roux, S., & Biekpe, N. (2017). Environmental degradation, ICT and inclusive development in Sub-Saharan Africa. *Energy Policy*, *111*, 353–361.
- Bellato, L., & Cheer, J. M. (2021). Inclusive and regenerative urban tourism: Capacity development perspectives. *International Journal of Tourism Cities*, *7*(4), 943–961.
- Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. *NursingPlus Open*, *2*, 8–14.
- Chu, E., Anguelovski, I., & Roberts, D. (2017). Climate adaptation as strategic urbanism: assessing opportunities and uncertainties for equity and inclusive development in cities. *Cities*, *60*, 378–387.
- Cooper, H. (2015). *Research synthesis and meta-analysis: A step-by-step approach* (Vol. 2). Sage publications.
- Diprose, R., Savirani, A., Setiawan, K. M. P., & Francis, N. (2020). *Women's collective action and the village law: How women are driving change and shaping pathways for gender-inclusive development in rural Indonesia. The Australia-Indonesia partnership for gender equality and women's ...*
- Dywili, S., & Draai, E. (2019). Citizen engagement to foster inclusive development planning in local governance. *Administratio Publica*, *27*(3), 256–273.
- Ekins, P., Gupta, J., & Boileau, P. (2019). *Global environment outlook–GEO-6: Healthy planet, healthy people*.
- Ernawati, E., Tajuddin, T., & Nur, S. (2021). Does government expenditure affect regional inclusive growth? An experience of implementing village fund policy in Indonesia. *Economies*, *9*(4), 164.
- Feagin, J. R., Orum, A. M., & Sjoberg, G. (2016). *A case for the case study*. UNC Press Books.
- Fernando, N. A. (2008). *Rural development outcomes and drivers: An overview and some lessons*.
- Fon, N. N. A., Achu, N. N., & Formella, C. N. (2024). Whose right is right? The dialectics of remedial secession and territorial sovereignty in the Cameroon Anglophone crisis. *Nationalism and Ethnic Politics*, *30*(3), 399–419.
- Fraser, B. J., & Walberg, H. J. (1991). *Educational environments: Evaluation, antecedents and consequences*. Pergamon Press.
- Gammelgaard, B. (2017). The qualitative case study. In *The International Journal of Logistics Management* (Vol. 28, Number 4, pp. 910–913). Emerald Publishing Limited.
- Gupta, J., & Bavinck, M. (2017). Reprint of “Inclusive development and coastal adaptiveness.” *Ocean & Coastal Management*, *150*, 73–81.
- Gupta, J., Bavinck, M., Ros-Tonen, M., Asubonteng, K., Bosch, H., van Ewijk, E., Hordijk, M., Van Leynseele, Y., Cardozo, M. L., & Miedema, E. (2021). COVID-19, poverty and inclusive development. *World Development*, *145*, 105527.
- Gupta, J., Pouw, N. R. M., & Ros-Tonen, M. A. F. (2015). Towards an elaborated theory of inclusive development. *The European Journal of Development Research*, *27*(4), 541–559.
- Gupta, J., & Vegelin, C. (2016). Sustainable development goals and inclusive development. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, *16*(3), 433–448.
- Hickey, S. (2013). *Thinking about the politics of inclusive development: Towards a relational approach*.
- Hutter, G. (2007). Strategic planning for long-term flood risk management: Some suggestions for learning how to make strategy at regional and local level. *International Planning Studies*, *12*(3), 273–289.
- Jones, P., & Comfort, D. (2020). A commentary on the United Kingdom's leading food retailers' resilience plans in the face of climate change. *Journal of Public Affairs*, *20*(2), e2047.

- Katyaini, S., Wessel, M. van, & Sahoo, S. (2021). Representation by development organizations: Evidence from India and implications for inclusive development. *The Journal of Environment & Development*, 30(1), 98–123.
- Keep, M., Montanari, B., & Greenlee, A. J. (2021). Contesting “inclusive” development: Reactions to slum resettlement as social inclusion in Tamesna, Morocco. *Cities*, 118, 103328.
- Kooy, M., Walter, C. T., & Prabaharyaka, I. (2018). Inclusive development of urban water services in Jakarta: The role of groundwater. *Habitat International*, 73, 109–118.
- Krippendorff, K. (2004). Measuring the reliability of qualitative text analysis data. *Quality and Quantity*, 38(6), 787–800.
- Lee, J., Babcock, J., Pham, T. S., Bui, T. H., & Kang, M. (2023). Smart city as a social transition towards inclusive development through technology: A tale of four smart cities. *International Journal of Urban Sciences*, 27(sup1), 75–100.
- Liu, W., Yang, J., Gong, Y., & Cheng, Q. (2022). An evaluation of urban renewal based on inclusive development theory: The case of Wuhan, China. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 11(11), 563.
- Malterud, K., Siersma, V. D., & Guassora, A. D. (2016). Sample size in qualitative interview studies: guided by information power. *Qualitative Health Research*, 26(13), 1753–1760.
- Matamanda, A. R., & Chinozvina, Q. L. (2020). Driving forces of citizen participation in urban development practice in Harare, Zimbabwe. *Land Use Policy*, 99, 105090.
- Moyo, T., & Mamobolo, M. (2014). The national development plan (NDP): A comparative analysis with the reconstruction and development programme (RDP), the growth, employment and redistribution (GEAR) programme and the accelerated and shared-growth initiative (ASGISA). *Journal of Public Administration*, 49(3), 946–959.
- Mudzakkir, M. F., Sukoco, B. M., & Suwignjo, P. (2022). World-class universities: past and future. *International Journal of Educational Management*, 36(3), 277–295.
- Murthi, N. W., Utama, M. S., Saskara, I. A. N., & Marhaeni, A. (2022). The effect of several factors on inclusive growth in the coastal village–Badung. *Central European Management Journal*, 30(4), 1371–1383.
- Oliver, R. L. (1980). A cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction decisions. *Journal of Marketing Research*, 17(4), 460–469.
- Paez, A. (2017). Gray literature: An important resource in systematic reviews. *Journal of Evidence-Based Medicine*, 10(3), 233–240.
- Popova, O. (2020). Inclusive development: a new concept or an update of the sustainable development concept? *Economy and Forecasting*, (1), 112–123.
- Pouw, N., & Gupta, J. (2017). Inclusive development: a multi-disciplinary approach. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 24, 104–108.
- Pouw, N. R. M., & De Bruijne, A. (2015). Strategic governance for inclusive development. *The European Journal of Development Research*, 27(4), 481–487.
- Priya, A. (2021). Case study methodology of qualitative research: Key attributes and navigating the conundrums in its application. *Sociological Bulletin*, 70(1), 94–110.
- Putra, I. K., Sukoco, B. M., & Wu, W.-Y. (2025). Landscape and opportunity of rural entrepreneurship: systematic literature review. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 14(1), 122.
- Rauniyar, G., & Kanbur, R. (2010). Inclusive growth and inclusive development: A review and synthesis of Asian Development Bank literature. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 15(4), 455–469.



- Reinders, S., Dekker, M., van Kesteren, F., & Oudenhuijsen, L. (2019). Inclusive development in Africa. *Synthesis Report Series of INCLUDE, the Knowledge Platform on Inclusive Development Policies*, 1–60.
- Roberts, K., Dowell, A., & Nie, J.-B. (2019). Attempting rigour and replicability in thematic analysis of qualitative research data; a case study of codebook development. *BMC Medical Research Methodology*, 19(1), 1–8.
- Sachs, I. (2004). Inclusive development and decent work for all. *Int'l Lab. Rev.*, 143, 161.
- Saks, M. (2023). The evolution of the medical and health professions in the National Health Services. In *National Health Services of Western Europe* (pp. 242–265). Routledge.
- Sha, K., Taeihagh, A., & De Jong, M. (2024). Governing disruptive technologies for inclusive development in cities: A systematic literature review. *Technological Forecasting and Social Change*, 203, 123382.
- Sibanda, M. M., & Lues, L. (2021). Public participation power dynamics in strategic development planning in a metropolitan municipality: Eastern Cape Province. *Journal of Local Government Research and Innovation*, 2, 44.
- Singh, R. P. B., & Kumar, S. (2020). Holy-Heritage city development and planning in India: A study of Ayodhya. In *Urban and regional planning and development: 20th Century Forms and 21st Century Transformations* (pp. 515–535). Springer.
- Sutherland, C., Scott, D., & Hordijk, M. (2015). Urban water governance for more inclusive development: A reflection on the 'waterscapes' of Durban, South Africa. *The European Journal of Development Research*, 27(4), 488–504.
- Tenny, S., Brannan, J. M., Brannan, G. D., & Sharts-Hopko, N. (2020). *Qualitative Study StatPearls Publishing*. Published.
- Triyanti, A., Bavinck, M., Gupta, J., & Marfai, M. A. (2017). Social capital, interactive governance and coastal protection: The effectiveness of mangrove ecosystem-based strategies in promoting inclusive development in Demak, Indonesia. *Ocean & Coastal Management*, 150, 3–11.
- Widianingsih, I., & Paskarina, C. (2019). Defining Inclusiveness in Development: Perspective from Local Government's Apparatus. *Jurnal Bina Praja*, 11(2), 137–147.